

ABSTRAK

Kawasan tanpa rokok merupakan salah satu upaya strategis dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan melindungi masyarakat dari paparan asap rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk mengkaji bagaimana kebijakan ini dilakukan secara nyata di lapangan serta menilai efektivitasnya dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih dari asap rokok. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, mengumpulkan data melalui dokumentasi dan wawancara. Analisis dilakukan melalui empat komponen utama: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel utama, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi pelaksana. Teori ini digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banjar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok telah berhasil diterapkan pada tataran normatif dan regulatif, ditandai dengan adanya dasar hukum yang jelas serta aturan turunan sebagai pedoman pelaksanaan. Namun demikian, pada tataran implementasi di lapangan, kebijakan ini belum berjalan secara optimal. Ketidakberhasilan implementasi terutama dari variabel komunikasi antarorganisasi pelaksana yang belum terkoordinasi secara efektif, serta keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia, maupun sarana pendukung penegakan kebijakan. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok belum sepenuhnya konsisten dan masih ditemui berbagai pelanggaran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun pondasi hukum dan tata kelola telah terbentuk, diperlukan langkah-langkah perbaikan seperti peningkatan edukasi masyarakat, penguatan pengawasan, dan kolaborasi lintas sektor untuk mencapai kepatuhan penuh terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banjar.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Kawasan Tanpa Rokok, Peraturan Daerah, Pemerintah Kecamatan

ABSTRACT

Smoke-free areas are a strategic effort to create a healthy environment and protect the public from exposure to cigarette smoke, both directly and indirectly. Banjar City Regional Regulation Number 7 of 2013 concerning the Smoke-Free Area Policy aims to examine how this policy is actually implemented in the field and assess its effectiveness in creating a healthy and smoke-free environment. The method used is qualitative research with a case study approach, collecting data through documentation and interviews. The analysis is carried out through four main components: data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This study uses the policy implementation theory of Van Meter and Van Horn which emphasizes that the success of policy implementation is influenced by six main variables, namely policy standards and targets, resources, inter-organizational communication, characteristics of implementing agents, social, economic, and political conditions, and the disposition of implementers. This theory is used to analyze factors that influence the effectiveness of the implementation of the Smoke-Free Area policy in Banjar City. The results of the study indicate that Banjar City Regional Regulation Number 7 of 2013 concerning Smoke-Free Areas has been successfully implemented at the normative and regulatory levels, marked by the existence of a clear legal basis and derivative regulations as guidelines for implementation. However, in terms of implementation, this policy has not been implemented optimally. Implementation failures stem primarily from the lack of effective coordination between implementing organizations and limited resources, both human and supporting facilities for policy enforcement. These conditions have resulted in inconsistent implementation of the Smoke-Free Zone policy, with numerous violations still being encountered. The conclusion of this study is that although the legal and governance foundations have been established, corrective measures such as increased public education, strengthened oversight, and cross-sector collaboration are needed to achieve full compliance with the Smoke-Free Zone policy in Banjar City.

Keywords: Policy Implementation, Smoke-Free Areas, Regional Regulations, Sub-district Government